

## TIGA PROYEK DI MALUKU MASUK PSN



Sumber Gambar : <https://siwalimanews.com>

Presiden Prabowo Subianto menetapkan 77 Program Strategi Nasional (PSN) yang masuk dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Dari total 77 PSN tersebut, 29 merupakan program baru sedangkan 48 lainnya merupakan program *carry over* dari pemerintahan Joko Widodo. Dari 77 PSN itu, tiga proyek Provinsi Maluku juga ikut masuk yaitu Pengembangan Pelabuhan Ambon Terpadu, Bendungan Way Apu, dan Pengembangan Lapangan Abdi Wilayah Kerja Masela.

Penetapan PSN itu tertuang didalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029, yang diteken Presiden pada 10 Februari lalu. Sedangkan Pengembangan Pelabuhan Ambon terpadu merupakan proyek baru dimasukan dalam PSN setelah sebelumnya batal dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Dimasukannya pengembangan pelabuhan Ambon terpadu dalam PSN di Maluku dalam RPJMD Nasional Tahun 2025-2029 ini tak lepas dari Gubernur Hendrik Lewerissa yang menyambangi Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, Januari lalu.

Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, mengaku bersyukur ketika Pemerintah Pusat menetapkan tiga proyek di Maluku masuk dalam daftar 77 PSN. Bendungan Way Apu dan Pengembangan Blok Lapangan Abadi Masela, sebelumnya telah masuk dalam PSN Pemerintahan Joko Widodo. Kebijakan Presiden Prabowo yang memasukan tiga program pembangunan dalam PSN, disambut baik oleh Pemerintah Provinsi Maluku. Gubernur berharap, proyek-proyek yang telah dimasukkan dalam PSN termasuk Pelabuhan Ambon Terpadu, dapat direalisasikan Pemerintah Pusat. Pemerintah Provinsi Maluku tidak boleh terlalu dini bergembira dengan dimasukannya tiga proyek dalam PSN, sebab pengalaman sebelumnya ada PSN yang tidak jalan di Maluku.

Sejumlah akademisi di Maluku menilai dimasukan Pengembangan Pelabuhan Ambon Terpadu dan dua proyek lain dalam PSN merupakan angin segar bagi masyarakat Maluku. Dimasukan tiga proyek dalam PSN Presiden Prabowo Subianto menunjukkan keberhasilan Gubernur Maluku dalam melobi ke Pemerintah Pusat. Untuk menjemput berbagai program Pemerintah Pusat berkaitan dengan PSN termasuk Pelabuhan Ambon terpadu, maka Pemerintah Provinsi Maluku harus menciptakan prasyarat kondisional dengan menggaransikan

tata kelola birokrasi yang memang benar-benar bersih, berwibawa dan bebas korupsi. Ketika suatu kesepakatan itu diambil maka mekanisme untuk mencari dan mewujudkan kesepakatan artinya tidak bisa kita hanya berpegang pada janji politik seperti yang telah dilakukan Presiden Joko Widodo, sebab faktanya kesepakatan itu kandas di tengah jalan ketika kepentingan itu tidak terkonstruksi lagi ke arah sana. Jika pelabuhan terpadu itu bisa berjalan baik, maka akan merangsang jenis usaha atau bidang usaha lain yang bisa dikerjakan oleh pemerintah Pusat. Karena itu, kita menyambut baik tiga proyek di Maluku masuk PSN, dan berharap seluruh infrastruktur itu sudah disiapkan secara baik oleh Pemerintah Provinsi Maluku agar berjalan dengan baik kedepannya dan bisa terealisasi.

**Sumber berita :**

1. *Harian Siwalima, “Tiga Proyek di Maluku masuk PSN”, 11 Maret 2025;*
2. *<https://beritalima.com/maluku-bangkit-lewat-psn-saadiah-uluputty-dorong-pemda-gerak-cepat/>, Diakses 18 Maret 2025;*
3. *<https://beritabeta.com/sikapi-psn-di-maluku-saadiah-uluputty-dorong-pemda-gerak-cepat/>, Diakses 18 Maret 2025; dan*
4. *<https://jurnalmaluku.com/nasional/lintas-daerah/menuju-maluku-mandiri-implementasi-psn-dalam-meningkatkan-daya-saing-kesejahteraan-masyarakat/>, Diakses 18 Maret 2025.*

**Catatan:**

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional, Proyek Strategis Nasional (PSN) adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha yang memiliki sifat strategis untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka upaya penciptaan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Proyek Strategis Nasional dilaksanakan dengan memprioritaskan integrasi konektivitas antar infrastruktur dan latau pusat kegiatan ekonomi untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi berbasis kewilayahan dengan memperhatikan arah pembangunan kewilayahan yang dimuat dalam perencanaan pembangunan nasional.

Penetapan PSN saat ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029. Perpres ini mengatur mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program pasangan Presiden dan Wakil Presiden hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional. RPJM Nasional dimaksud memuat strategi Pembangunan Nasional, kebijakan umum, program kementerian/lembaga dan lintas kementerian/lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro

yang mencakup gambaran secara menyeluruh dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.